

## **LAKIP SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA DAN ANGGARAN KEPADA CIVITAS AKADEMIKA IPDN DAN MASYARAKAT**

**Oleh**  
**Wawan Suwanda**  
**Email wawan@suh.ipdn.ac.id**

### **Abstract**

Penetapan Kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat tahun 2016 menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja. Dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut, 5 (lima) indikator mencapai penilaian kategori “Sangat Baik” dan 1 (satu) indikator mencapai kategori “sangat kurang” karena terjadinya efisiensi anggaran pembangunan. Capaian penilaian indikator tersebut dilihat dari pencapaian kinerja dari segi anggaran. Sedangkan capaian kinerja berdasarkan realisasi capaian volume dari 6 (enam) indikator dimaksud, terdapat 2 (dua) indikator dengan penilaian kategori “Sangat Baik”, 2 (dua) indikator dengan penilaian kategori “Baik” dan 2 (dua) indikator dengan penilaian “Sangat Kurang”. Disamping itu, IPDN Kampus Kalimantan Barat juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Kata Kunci : Kinerja, Indikator dan Sasaran Stratgis.

### **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN mempunyai tugas yang sangat strategis dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini karena Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berperan menciptakan kader Pamong Praja yang professional. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan di Kampus IPDN Pusat di Jatinangor, Kampus IPDN Cilandak di Jakarta dan Kampus IPDN di Daerah yang merupakan satu kesatuan Organisasi IPDN termasuk IPDN Kampus Kalimantan Barat.

IPDN Kampus Kalimantan Barat mulai beroperasi pada Maret 2011 dengan kapasitas Praja pada saat itu hanya 100 orang praja. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 25/PK-BPKAD/2011 tentang Penunjukan Pemanfaatan Aseet Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan Komplek UPRS

Provinsi Kalimantan Barat seluas  $\pm$  40.989M2 yang terletak di Jln Trans Kalimantan KM 11,5 Kecamatan Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Kepada Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Pinjam Pakai dan perpanjangan kesatu perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa IPDN Kampus Kalimantan Barat masih memakai gedung dan bangunan milik pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang dulunya digunakan oleh Dinas Sosial Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS).

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan maksud untuk mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang siap tugas dan siap dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada masa pemerintahan dewasa ini, pamong praja telah menjadi sebuah profesi kepamongprajaan yang berjiwa dan bersemangat kenegarawanan (statemanship), kepemimpinan pemerintahan (leadermanship) dan kepelayanan (servicemanship). Korps Pamong Praja memiliki peran utama sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan (policy makers), koordinator pemerintahan (governance coodinator), mediator kemasyarakatan (social mediator), dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa (national integration). Selain itu, tugas-tugas pamong praja juga mencakup pelaksanaan tugas residu atau tugas sisa di bidang pemerintahan yang secara nyata belum dapat dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, IPDN dituntut harus transparan, akuntabel efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-undang dimaksud adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban IPDN Kampus Kalbar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi IPDN sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian dan unit di IPDN Kampus Kalbar serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja IPDN Kampus Kalbar. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Surat Setjen Kemendagri Nomor 060.1/4314/SJ tanggal 14 November 2016 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 bahwa setiap komponen di Lingkungan Kemendagri wajib untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menyusun serta melaporkan Kinerja ke Kementerian Dalam Negeri.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Akuntabilitas**

Menurut Syahrudin Rasul (2002:8), Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan Menurut Teguh Arifiyadi (2008), Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sebenarnya merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah kita gunakan dan hasilkan baik berupa kinerja maupun anggaran.

## **b. Kinerja**

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Bastian,2006). Sementara menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti(2001:50) mengemukakan, performance diterjemahkan menjadi kinerja, jugaberarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/unjukkerja/penampilan kerja. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh suatu organisasi dalam rentang waktu tertentu.

Sedangkan fungsi dari evaluasi atau penilaian kinerja diantaranya; untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja organisasi; serta untuk memberikan masukan dalam mengatasi masalah yang ada. (BPKP dan LAN, 2000).

## **c. Anggaran**

Pengertian Anggaran menurut Munandar (2001:11), [Anggaran](#) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefenisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen (Welsch, 2000:5).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana sistematis yang dinyatakan dalam bentuk angka yang berlaku dalam jangka waktu yang akan datang sebagai bentuk kegiatan organisasi dan pengendalian tanggung jawab manajemen.

# **III. PEMBAHASAN**

## **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Penetapan Kinerja IPDN Kampus Kalimantan Barat tahun 2016 menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja. Dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut, 5 (lima) indikator mencapai

penilaian kategori “Sangat Baik” dan 1 (satu) indikator mencapai kategori “sangat kurang” karena terjadinya efisiensi anggaran pembangunan. Capaian penilaian indikator tersebut dilihat dari pencapaian kinerja dari segi anggaran. Sedangkan capaian kinerja berdasarkan realisasi capaian volume dari 6 (enam) indikator dimaksud, terdapat 2 (dua) indikator dengan penilaian kategori “Sangat Baik”, 2 (dua) indikator dengan penilaian kategori “Baik” dan 2 (dua) indikator dengan penilaian “Sangat Kurang”.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2016, serta hasil capaian 6 (enam) Indikator Kinerja dari segi anggaran dan volume, yang diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pengajaran, Pelatihan pada IPDN Kampus Kalimantan Barat	Peningkatan rata rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, pengasuhan) program diploma	0,04 (dari IPK Th sebelumnya), meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>3 dokumen penyelenggaraan pengajaran</li> <li>1 dokumen pengelolaan perpustakaan</li> <li>343 buku perpustakaan</li> <li>3 dokumen penyelenggaraan pelatihan</li> <li>2 dokumen penyelenggaraan laboratorium</li> <li>2 dokumen praktek lapangan (PL II, Desa LUK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 dokumen penyelenggaraan pengajaran</li> <li>1 dokumen pengelolaan perpustakaan</li> <li>343 buku perpustakaan</li> <li>3 dokumen penyelenggaraan pelatihan</li> <li>2 dokumen penyelenggaraan laboratorium</li> <li>2 dokumen praktek lapangan (PL II, Desa LUK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>99.65 % (dari segi anggaran)</li> <li>100 % (dari segi volume)</li> </ul>
		Persentase penyelesaian dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya IPDN Kampus Daerah secara tepat waktu	100%, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 dokumen kerjasama (MoU)</li> <li>3 dokumen perencanaan program dan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L)</li> <li>3 dokumen pelayanan dan pembinaan verifikasi keuangan dan perbendaharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 dokumen kerjasama (MoU)</li> <li>2 dokumen perencanaan program dan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L)</li> <li>3 dokumen pelayanan dan pembinaan verifikasi keuangan dan perbendaharaan (SAIBA, SIMAK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>94.89 % (dari segi anggaran)</li> <li>90.91% (dari segi volume)</li> </ul>

			<p>(SAIBA, SIMAK BMN, Laporan Keuangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 dokumen layanan administrasi dan pengelolaan kepegawaian (...pegawai, Standar Operasioal Prosedur (SOP) dan 2 orang dukungan diklat)</li> <li>▪ 3 dokumen layanan unit penunjang pendidikan(Pamda 1, Kesehatan dan Loundry)</li> <li>▪ 6 dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan (4 laporan triwulanan, 1 Laporan Kinerja Tahunan, 1 laporan SPIP)</li> <li>▪ 1 dokumen penerapan reformasi birokrasi</li> <li>▪ 12 bulan layanan gaji dan tunjangan</li> </ul>	<p>BMN, Laporan Keuangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 dokumen layanan administrasi dan pengelolaan kepegawaian, Standar Operasioal Prosedur (SOP) dan 1 orang dukungan diklat)</li> <li>▪ 3 dokumen layanan unit penunjang pendidikan(Pamdal, Kesehatan dan Menza dan Loundry)</li> <li>▪ 4 dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan (4 laporan triwulanan, 1 Laporan Kinerja Tahunan, 1 laporan SPIP)</li> <li>▪ 1 dokumen penerapan reformasi birokrasi</li> <li>▪ 12 bulan layanan gaji dan tunjangan</li> </ul>	
2	Meningkatnya Pelaksanaan Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah hasil kajian penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 rekomendasi hasil kajian dan penelitian program vokasi</li> <li>▪ 6 dokumen penyelenggaraan kajian dan penelitian</li> <li>▪ 4 rekomendasi hasil pengabdian masyarakat</li> <li>▪ 1 desa binaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 rekomendasi hasil kajian dan penelitian program vokasi</li> <li>▪ 4 rekomendasi hasil pengabdian masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 98.57 % (dari segi anggaran)</li> <li>▪ 46.15% (dari segi volume)</li> </ul>
3	Meningkatnya prestasi ekstrakurikuler Praja pada tingkat lokal	Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praja pada IPDN	<p>5% (dari 25 pelanggaran berat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 dokumen penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan</li> <li>▪ 2 dokumen pemberkasan dan pemutakhiran data (madya, nindya)</li> </ul>	<p>5% (dari 25 pelanggaran berat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 dokumen penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan</li> <li>▪ 1 dokumen pemberkasan dan pemutakhiran data (madya, nindya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 98.06 % (dari segi anggaran)</li> <li>▪ 80.00 % (dari segi volume)</li> </ul>

		Peningkatan jumlah Prestasi Praja pada tingkat lokal (daerah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 penghargaan tingkat lokal</li> <li>▪ 4 dokumen penyelenggaraan ekstrakurikuler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 dokumen penyelenggaraan ekstrakurikuler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 91.94 % (dari segi anggaran)</li> <li>▪ 80.00 % (dari segi volume)</li> </ul>
4	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar mutu pendidikan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 65% ketersediaan dukungan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>▪ 2 dokumen ketatausahaan dan pengelolaan aset</li> <li>▪ 12 bulan layanan operasional dan pemeliharaan kantor</li> <li>▪ Pembangunan Gedung seluas 3.256 M2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 65% ketersediaan dukungan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>▪ 2 dokumen ketatausahaan dan pengelolaan aset</li> <li>▪ 12 bulan layanan operasional dan pemeliharaan kantor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 34.74 % (dari segi anggaran)</li> <li>▪ 0.43 % (dari segi volume)</li> </ul>

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan IPDN Kampus Kalimantan Barat selama kurun waktu tahun 2016, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Untuk menggambarkan capaian kinerja IPDN Kampus Kalimantan Barat Tahun 2016, IPDN Kampus Kalimantan Barat melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan di daerah. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibatasi pada data primer.

<b>1.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kualitas Pengajaran, Pelatihan pada IPDN Kampus Kalimantan Barat
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% (anggaran)	% (Volume)
1.	Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, pengasuhan) program diploma	354 (dokumen/ buku)	354 (dokumen/ buku)	99.65 %	100 %

Faktor pendukung indikator kinerja “Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, pengasuhan) program diploma” adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penambahan muatan local pembuatan LA;
- b. Adanya penambahan muatan local bahasa mandarin;
- c. adanya penambahan muatan local bahasa inggris.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja “Peningkatan rata rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, pengasuhan) program diploma” adalah sebagai berikut:

- a. kurangnya fasilitas laboratorium pemerintahan dan bahasa;
- b. kurangnya praktek keluar;
- c. kurangnya pengawasan Praja di malam hari, sehingga masih didapati Praja yang mengantuk di pagi hari.

Rekomendasi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan fasilitas di Laboratorium Pemerintahan dan bahasa;
- b. Penambahan anggaran pendidikan;
- c. penegakan disiplin pengajaran harus tegas.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% (Anggaran)	% (Volume)
2.	Persentase penyelesaian dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya IPDN Kampus Daerah secara tepat waktu	33 (dokumen/bulan layanan)	30 (dokumen/ bulan layanan)	94.89 %	90.91 %

Faktor pendukung indikator kinerja “Persentase penyelesaian dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya IPDN Kampus Daerah secara tepat waktu” adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya semangat dan disiplin kerja serta komitmen bersama di IPDN Kampus Kalbar;
- b. Adanya dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai prosedur;
- c. Terjalinnnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik di IPDN Kalbar.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja “Persentase penyelesaian dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya IPDN Kampus Daerah secara tepat waktu” adalah sebagai berikut:

- a. kurangnya jumlah SDM yang menangani kegiatan/program terkait;
- b. kurangnya pemahaman SDM dalam menangani kegiatan/program terkait.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota dalam penyelesaian berbagai kebijakan dan kegiatan;
- c. Penambahan, pengembangan serta pemberdayaan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di IPDN Kalbar.

<b>2.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Pelaksanaan Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% (Anggaran)	% (Volume)
1.	Jumlah hasil kajian penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan akademik	13 (dokumen)	6 (dokumen)	98.57 %	46.15 %

Faktor pendukung indikator kinerja “Jumlah hasil kajian penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan akademik” adalah sebagai berikut :

- a. kemampuan sumber daya peneliti yang kompeten;
- b. adanya anggaran untuk penelitian;
- c. sebagai wadah tuntutan kompetensi dosen dan akreditasi lembaga.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang terbatas;
- b. kurangnya isu yang menarik untuk diteliti;
- c. waktu pelaksanaan yang terbatas.

Rekomendasi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Isu yang diteliti harus bermanfaat untuk lembaga;
- b. Penelitian menjadi kewajiban dan keharusan;
- c. Perlu penganggaran yang sesuai.

<b>3.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya prestasi ekstrakurikuler Praja pada tingkat lokal
-----------	---------------------------------------------------------------------------------

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% (Anggaran)	% (Volume)
1.	Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praja pada IPDN	5 (dokumen)	4 (dokumen)	98.06 %	80.00 %

Faktor pendukung indikator kinerja “Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praja pada IPDN” adalah sebagai berikut :

- a Adanya petugas yang ditugaskan sebagai petugas penanggungjawab dan pengawasan;
- b Adanya Permendagri No 63 Tahun 2015 tentang Petadupra;
- c Adanya pengawasan melekat dari pimpinan.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja “Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praja pada IPDN” adalah sebagai berikut:

- a Kurangnya jumlah pengasuh;
- b Kurangnya sarana pendukung;
- c Terjadinya pelanggaran pada saat Praktek lapangan.

Rekomendasi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah pengasuh;
- b. Melengkapi sarana pendukung;
- c. Meningkatkan pengawasan Praja pada saat Praktek Lapangan.

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% (Anggaran)	% (Volume)
2.	Peningkatan jumlah Prestasi Praja pada tingkat lokal (daerah)	5 (dokumen)	4 (dokumen)	91.94 %	80.00 %

Penyebab penurunan keberhasilan antara lain:

- a. Kurangnya even atau perlombaan;
- b. Kurangnya pembinaan ekstrakurikuler kepada Praja;
- c. Kurangnya minat Praja.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya tenaga pelatih profesional;
- b. Kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler;

c. Minimnya anggaran pembinaan ekstrakurikuler Praja.

Rekomendasi dan saran untuk perbaikan capaian kinerja ditahun-tahun berikutnya antara lain:

- a. Meningkatkan jumlah tenaga pelatih professional;
- b. Meningkatkan sarana dan prasana pendukung serta menambah anggaran pembinaan;
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga atau universitas lain dalam rangka meningkatkan ekstrakurikuler Praja.

<b>4.</b>	<b>Sasaran :</b> Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar mutu pendidikan
-----------	----------------------------------------------------------------------------------

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% (Anggaran)	% (Volume)
1.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	3270 (dokumen, bulan layanan dan atau luas m2)	14 (dokumen dan atau bulan layanan)	34.74	0.43 %

Faktor pendukung indikator “Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan” adalah:

- a. Tingginya semangat dan disiplin kerja serta komitmen bersama di IPDN Kampus Kalbar;
- b. Adanya dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai prosedur;
- c. terjalinnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik di IPDN Kalbar.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah terjadi penghematan atau efisiensi anggaran kegiatan pembangunan.

Rekomendasi dan saran untuk perbaikan capaian kinerja ditahun-tahun berikutnya antara lain jika terjadi selfblocking anggaran seharusnya di system aplikasi OMSPAN maupun E-monev sudah tidak tercantum lagi anggaran semula agar tidak mengganggu prosentase realisasi sebenarnya.

## B. Realisasi per Kegiatan

Berikut disampaikan realisasi per kegiatan di IPDN Kampus Kalimantan Barat sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Nama Output	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Total		
		B.Pegawai (Rp.)	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)	B.Pegawai (Rp.)	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)	Total Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persen Realisasi (%)
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.001 Penyelenggaraan Pengajaran (Dokumen)	0	170.771.000	0	0	169.448.466	0	170.771.000	169.448.466	99 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.002 Penyelenggaraan Perpustakaan (Dokumen)	0	14.420.000	0	0	14.270.000	0	14.420.000	14.270.000	99 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.003 Buku-Buku Perpustakaan (Buku)	0	0	50.000.000	0	0	49.712.190	50.000.000	49.712.190	99 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.004 Penyelenggaraan Pelatihan (Dokumen)	0	514.054.000	0	0	513.222.000	0	514.054.000	513.222.000	100 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.005 Pelaksanaan Kerjasama (Dokumen)	0	14.840.000	0	0	14.840.000	0	14.840.000	14.840.000	100 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.006 Pelaksanaan Kajian dan Penelitian (Rekomendasi)	0	75.780.000	0	0	75.780.000	0	75.780.000	75.780.000	100 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.007 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (Rekomendasi)	0	64.920.000	0	0	62.920.000	0	64.920.000	62.920.000	97 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.008 Penyelenggaraan Bimbingan dan Pengawasan (Dokumen)	0	135.798.000	0	0	133.038.912	0	135.798.000	133.038.912	98 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan	1295.009 Penyelenggaraan	0	108.470.000	0	0	99.726.000	0	108.470.000	99.726.000	92 %

Nama Kegiatan	Nama Output	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Total		
		B.Pegawai (Rp.)	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)	B.Pegawai (Rp.)	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)	Total Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persen Realisasi (%)
Kepamongprajaan di Daerah	Ekstrakurikuler (Dokumen)									
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.010 Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran (Dokumen)	0	91.089.000	0	0	90.409.647	0	91.089.000	90.409.647	99 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.011 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan (Dokumen)	0	67.291.000	0	0	62.781.900	0	67.291.000	62.781.900	93 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.012 Pengelolaan Kepegawaian (Dokumen)	0	52.500.000	0	0	49.096.324	0	52.500.000	49.096.324	94 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.013 Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (Dokumen)	0	41.754.000	0	0	39.583.500	0	41.754.000	39.583.500	95 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.014 Penyelenggaraan Unit Penunjang (Dokumen)	0	45.338.000	0	0	44.841.000	0	45.338.000	44.841.000	99 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.015 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Dokumen)	0	71.475.000	0	0	68.910.437	0	71.475.000	68.910.437	96 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.020 Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan (Dokumen)	0	6.360.000	0	0	6.360.000	0	6.360.000	6.360.000	100 %
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	3.755.078.000	9.629.211.000	0	3.495.616.552	9.198.492.680	0	13.384.289.000	12.694.109.232	95 %

Nama Kegiatan	Nama Output	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Total		
		B.Pegawai (Rp.)	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)	B.Pegawai (Rp.)	B.Barang (Rp.)	B.Modal (Rp.)	Total Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Persen Realisasi (%)
1295 Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah	1295.998 Gedung/Bangunan (M2)	0	0	40.000.000.000	0	0	5.826.491.096	40.000.000.000	5.826.491.096	15 %
Total		3.755.078.000	11.104.071.000	40.050.000.000	3.495.616.552	10.643.720.866	5.876.203.286	54.909.149.000	20.015.540.704	36 %

### C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) KPPN Per 31 Desember 2016 realisasi APBN IPDN Kampus Kalimantan Barat adalah sebesar Rp.20.015.540.704,- atau 36.45% persen dari Pagu Anggaran sebesar Rp.54.909.149.000.- yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1  
REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Pegawai	3.755.078.000	3.495.616.552	93.09 %	259.461.448	6.91 %
2	Belanja Barang	11.104.071.000	10.643.720.866	95.85 %	460.350.134	4.15 %
3	Belanja Modal	40.050.000.000	5.876.203.286	14.67 %	34.173.796.714	85.33 %
<b>Total</b>		<b>54.909.149.000</b>	<b>20.015.540.704</b>	<b>36.45 %</b>	<b>34.893.608.260</b>	<b>63.55 %</b>

Sesuai kebijakan pemerintah tentang penghematan anggaran IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp.34.475.544.000,- sehingga anggaran IPDN Kampus Kalimantan Barat Menjadi Rp.20.433.605.000,- dan realisasi persentase menjadi 98.14%. Perbandingan realisasi Anggaran dan realisasi belanja sebelum dan sesudah efisiensi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7

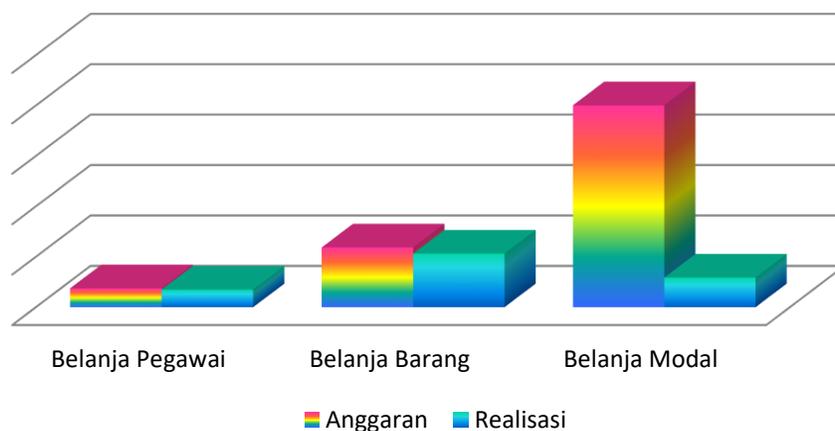
Realisasi Anggaran sebelum dan sesudah penghematan Anggaran

Kode Jns Belanja	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	3.755.078.000	3.495.616.552	93,09%
52	Belanja Barang	11.104.071.000	10.643.720.866	95,85%
53	Belanja Modal	40.050.000.000	5.876.203.286	14,67%
	<b>Total</b>	<b>54.909.149.000</b>	<b>20.015.540.704</b>	<b>36,45%</b>
setelah penghematan				
Kode Jns Belanja	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	3.755.078.000	3.519.472.344	93,73%
52	Belanja Barang	10.800.885.000	10.658.602.066	98,68%
53	Belanja Modal	5.877.642.000	5.876.203.286	99,98%
	<b>Total</b>	<b>20.433.605.000</b>	<b>20.054.277.696</b>	<b>98,14%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja sebelum penghematan dapat dilihat dalam grafik berikut:

Bagan 1

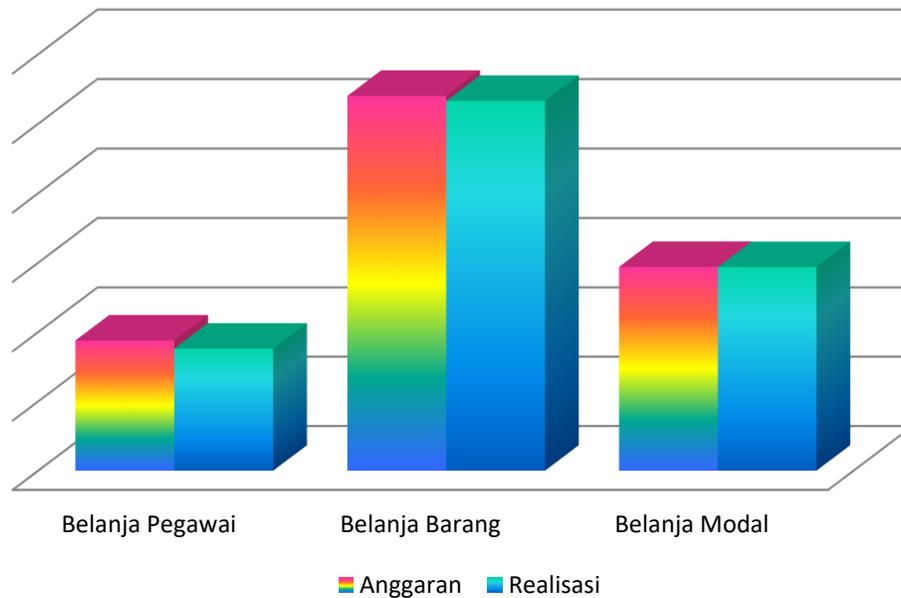
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016  
Sebelum Penghematan



Komposisi anggaran dan realisasi belanja setelah penghematan dapat dilihat dalam grafik berikut:

Bagan 2

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 Setelah Penghematan**



**IV. PENUTUP**

Laporan akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat Tahun 2016, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan IPDN Kampus Kalimantan Barat sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa IPDN Kampus Kalimantan Barat telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar IPDN Kampus Kalimantan Barat yaitu 1) Bidang Akademik dan Kerjasama 2) Bidang Tata Usaha 3) Bidang Administrasi Keprajaan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap

pencapaian keberhasilan tugas IPDN Kampus Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah.

Capaian Kinerja IPDN Kampus Kalimantan Barat pada tahun 2016 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja IPDN Kampus Kalimantan Barat. Berdasarkan indikator tersebut dan diukur secara rata-rata, IPDN Kampus Kalimantan Barat telah melakukan kinerja secara maksimal dengan nilai kinerja sebesar 66,25 %.

Laporan Akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja IPDN Kampus Kalimantan Barat tahun 2016 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis IPDN.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.

KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.